

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Akuntabilitas pemerintah masih menjadi salah satu isu yang diperbincangkan saat ini. Hal ini dikarenakan sebagian pemerintah Indonesia masih memiliki indikator akuntabilitas yang dianggap masih rendah Ahyaruddin & Akbar, 2018). Laporan keuangan pemerintah semester I tahun 2021, terdapat satu pemda yang tidak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 (*unaudited*) yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan mengkaji hasil laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Terdapat 55 pemerintah daerah yang tidak menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 10 diantaranya memiliki masalah terkait dengan PC-PEN yang mempengaruhi kewajaran penyampaian LKPD pada tahun 2020 (IHPS-Semester-I-TA-2021).

Terdapat tiga aspek penting dalam pencapaian akuntabilitas pada sektor publik, yaitu ketersediaan informasi, kejelasan peran dan tanggung jawab antar organisasi, serta sistem informasi yang tersistematik (Ngakil & Kaukab, 2020). Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional, pengembangan *e-governance* mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan dan Yudianto (2018), pengambilan keputusan dalam penyajian laporan keuangan dapat menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian laporan keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah (Anggriawan & Yudianto, 2018).

Akuntabilitas pemerintah daerah memiliki relevansi dengan ayat al-quran dan hadist berikut:

Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh mu untuk menyampaikan sebuah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memberikan hukum kepada antara manusia maka kamu harus menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. (Qs. An-Nisa:58)

HR. Bukhari dan muslim :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Dari Ibnu Umar Ra dan Nabi Muhammad SAW bersabda “ Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminya pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Isi kandungan ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman, agar selalu menjaga kewajiban yang dipercayakan kepada mereka. Kewajiban mereka berupa sifat takwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Penerapan ayat di atas berupa sikap percaya atau tanggung jawab (akuntabilitas) kepada publik mengenai sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Berdasarkan ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel kepada publik.

Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas terkait dengan tercapainya akuntabilitas publik (Purba & Amrul, 2018). Pada sektor publik, kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh pada perkembangan perekonomian nasional serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020). Ada beberapa alasan untuk pernyataan ini. Pertama, lembaga publik menggunakan anggaran negara untuk mengelola atau memberikan layanan publik kepada masyarakat (Barizah et al., 2011). Atas dasar ini, pemerintah dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya nasional. Kedua, Lembaga publik dapat menunjukkan daya tanggap, akuntabilitas, dan transparansinya dengan menyediakan informasi akuntansi yang berkualitas. Informasi akuntansi yang berkualitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi dan mencegah tindak korupsi yang terjadi di lingkungan sektor publik (Beshi & Kaur, 2020). Ketiga, masyarakat menggunakan informasi ini untuk memantau aktivitas sektor publik, sehingga membuat organisasi ini lebih akuntabel dan sadar akan tanggung jawab mereka (Menocal & Sharma, 2008). Hal ini dianggap sebagai strategi nasional dalam konteks tren integrasi yang mampu

membuat ekonomi global semakin kuat (Coronel, 2001).

Namun demikian, masih terdapat beberapa fenomena terkait dengan belum tercapainya sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Terdapat beberapa instansi di Pemerintah Indonesia belum mempunyai sistem yang terintegrasi dan terhubung dengan instansi pemerintah lainnya (Abnur, 2018). Heru (2017) sistem informasi akuntansi yang terdapat pada pemerintahan dinilai belum handal. Diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang handal dalam pengelolaan keuangan untuk menopang fungsi akuntabilitas, manajerial dan pengawasan. Fenomena-fenomena di atas dikuatkan oleh Budiriyanto (2013) yang menemukan bahwa terdapat isu lain terkait dengan berbagai sistem informasi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 206 pemerintah daerah dengan 304 temuan terkait sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum memadai. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017 terjadi kelemahan pada sistem informasi akuntansi dan pelaporan lainnya, termasuk keterlambatan dan ketidakmampuan staf dalam penyajian laporan, serta masalah pada sistem pengendalian akuntansi.

Fenomena-fenomena yang disorot di atas diduga menjadi pemicu masih lemahnyakualitas informasi akuntansi di pemerintah daerah. Beberapa penelitian mencatat bahwa sistem informasi akuntansi untuk entitas mana pun tidak berdiri sendiri, terdapat beberapafaktor kunci yang terlibat dalam keberhasilan sebuah sistem (Mkonya et al., 2018). Teori kontigensi menjelaskan bahwa desain sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada faktor-faktor di dalam organisasi (Susanto, 2016). Sistem informasi menurut Omar Ahmad, Al-Dalaie dan Khan

(2018) mencakup pengkoordinasian antara hal-hal logis dan fisik, termasuk data, proses, kebijakan, protokol, keahlian, perangkat keras, perangkat lunak, tanggung jawab, dan komponen lain yang menentukan keberhasilan suatu organisasi.

Thoa dan Nhi (2022) menemukan bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pimpinan, ketersediaan dan fungsi perangkat keras, ketersediaan dan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan fungsi jaringan komunikasi berperan terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan. Namun, penelitian mereka memiliki beberapa keterbatasan, yaitu data yang sangat beragam, tetapi ukuran sampel masih cukup kecil dibandingkan dengan kerangka sampling. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan atau menambah ukuran sampel dan meningkatkan jumlah Lembaga publik yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam pembelanjaan dan investasi. Selain itu faktor-faktor dalam model penelitian hanya menyumbang 57,9% dari variabilitas dalam kualitas informasi akuntansi keuangan.

Nguyen et al. (2020) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa budaya organisasi, teknologi organisasi, partisipasi manajer, pengetahuan manajer akuntansi, pengetahuan manajer tentang teknologi informasi, pelatihan pengguna, dan konsultasi dari para ahli atau *expert* merupakan faktor penentu keberhasilan dari kualitas sistem informasi akuntansi.

Zeina et al. (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas sistem informasi pada Pemerintah Indonesia (BUMD Wilayah Bandung) memiliki peran positif dengan budaya organisasi, pengendalian intern, struktur organisasi, komitmen manajemen, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan secara parsial maupun simultan. Serta kualitas sistem informasi akuntansi memiliki peran positif

terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani A (2021) memberikan hasil bahwa secara parsial sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, masing-masing berperan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada OPD Kota Medan.

Secara ringkas, tujuan dari penelitian ini yaitu menguji secara empiris peran kualitas sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas yang dimiliki organisasi perangkat daerah dengan menambah beberapa determinan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hubungan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan menggunakan beberapa faktor internal yang mencakup pengetahuan kepala akuntan, ketersediaan fungsi perangkat keras, ketersediaan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan fungsi jaringan komunikasi mengenai kualitas sistem informasi akuntansi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan studi empiris tentang sistem informasi akuntansi dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian terkait dampak sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Sleman.

Berdasarkan uraian diatas yang disertai dengan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil beragam, maka judul yang diajukan oleh penulis adalah “Determinan dan Konsekuensi dari Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (Studi Empiris di Lingkup Pemerintah Daerah Sleman)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan akuntansi berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
2. Apakah ketersediaan dan fungsi perangkat keras berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
3. Apakah ketersediaan dan fungsi perangkat lunak berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
4. Apakah ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
5. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berperan terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris peran pengetahuan akuntansi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris peran ketersediaan dan fungsi perangkat keras terhadap terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris peran ketersediaan dan fungsi perangkat lunak terhadap terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
4. Untuk menguji secara empiris peran ketersediaan dan fungsi jaringan

komunikasi terhadap terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

5. Untuk menguji secara empiris peran kualitas sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah.

## **A. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dasar tentang peran dari sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan studi empiris terkait dengan sistem informasi akuntansi yang berpengaruh pada akuntabilitas organisasi terutama Pemerintah Daerah Kota Sleman.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dengan mempertimbangkan faktor internal organisasi, terutama pengetahuan akuntansi, ketersediaan dan fungsi perangkat keras, ketersediaan dan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi dalam mencapai keberhasilan akuntabilitas organisasi.

### 3. Manfaat Literatur

Untuk mengetahui hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan kualitas sistem informasi akuntansi, akuntabilitas pemda, pengetahuan akuntansi, ketersediaan dan fungsi *hardware*, ketersediaan dan fungsi *software*, ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi.